



**SIDANG PUTUSAN
PEMBUNUHAN ARYA GADING**

**EDY GUNTUR
DIHUKUM
MATI**

BACA HALAMAN 2-4



**POLDA KALTARA GELAR
DEKLARASI DAMAI UNTUK
PEMILU AMAN DAN KONDUSIF**

BACA HALAMAN 11



ADE/MKR

Suasana sidang kasus pembunuhan Arya Gading

Sidang Putusan Pembunuhan Arya Gading

Edy Guntur Dihukum Mati

TARAKAN - Sidang kasus pembunuhan Arya Gading Ramadhan (19) kini telah memasuki tahap penetapan keputusan. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib didampingi Alfianus Rumondor dan Agus Purwanto dan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Tarakan Kamis (31/8/2023), dengan menghadirkan tiga terdakwa yakni Edy Guntur (23), Afrila (22) dan Mendila (45) secara online.

Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Achmad Syaripudin melalui Humas Imran Marannu Iriansyah mengatakan bahwa hari ini Majelis Hakim telah memutus perkara 3 berkas atas nama Edy Guntur (EG), Afrila (AF), dan Mendila (MN).

Adapun putusan terhadap ketiga terdakwa yakni untuk Afrila, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditun-

tut selama 14 tahun. Namun oleh Majelis Hakim diputuskan hukuman 10 tahun. Sedangkan Mendila, dituntut seumur hidup oleh majelis hakim. Putusan terhadap Mendila

sependapat dengan JPU. "Dan untuk Mendila diputus pula dengan pidana seumur hidup kami sependapat dengan JPU," ucapnya.





Selanjutnya, untuk terdakwa Edy Guntur dari tuntutan seumur hidup, oleh Majelis Hakim diputuskan hukuman mati.

“Setelah bermusyawarah majelis hakim sepakat memutus hukuman mati. Adapun pokok-pokok pertimbangan hakim memutuskan hukum mati karena untuk Epertama tidak ada unsur-unsur yang meringankan. Kedua, unsur pada pasal 340 telah terbukti secara sempurna menurut fakta-fakta

dipersidangan,” katanya.

Sementara untuk Afrila, yang meringankan hukumannya karena perannya hanya ikut serta. Selain itu, Afrila juga memiliki tiga anak sehingga putusan hukuman diringankan.

“Untuk terdakwa Afrila yang dituntut 14 tahun kemudian diputuskan menjadi 10 tahun. Majelis hakim telah menuangkan hal-hal yang meringankan. Kemudian dipertimbangkan peran Afrila tidak seberapa

karena hanya ikut serta,” ungkapnya.

Imran mengungkapkan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum. Sebab masih ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi bahkan masih bisa BK.

“Jadi kita liyat saja. Ini putusan masih belum berkekuatan hukum tetap,” tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



Ibu Arya Gading, Jumiati menangis usai majelis hakim memutuskan Edy dihukum mati.

Tangis Ibu Arya Pecah Usai Hakim Putuskan Edy Dihukum Mati

TARAKAN - Ibu Arya Gading Ramadhan, Jumiati menangis histeris usai Hakim Ketua, Abdul Rahman memutuskan Edy Guntur dihukum mati. Jumiati menyebut putusan ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga

“Alhamdulillah ini yang kami harapkan. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terutama pak Komang, yang dari awal berusaha menghadirkan bukti-bukti. Saya ucapkan banyak terima kasih,” ucapnya, kepada awak media Kamis (31/8/2023).

Jumiati dalam kesempatan ini pun meminta maaf apabila selama persidangan ada perbuatannya yang kurang berkenan.

“Saya selaku orang tua juga meminta maaf apabila ada perbuatan saya kurang berkenan. Hati mana yang tidak sakit jika anaknya dibunuh dengan sadis. Saya minta maaf jika kelakuan saya ada yang tidak baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komang Noprizal mengatakan bahwa pada intinya JPU mempunyai waktu 7 hari ke depan untuk menentukan sikap atau banding.

“Kalau seperti putusan tadi, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan dari tuntutan JPU. Artinya konform semua,” tuturnya.

Terkait putusan Afrila dari 14 tahun turun menjadi 10 tahun, JPU menilai hal itu keputusan Majelis Hakim. “Untuk masalah tersebut ada hal hal yang meringankan. Hal hal yang meringankan tadi itu karena ia memiliki anak,” katanya.

Komang pun mengapresiasi putusan mati kepada Edy Guntur oleh Majelis Hakim. Menurutnya, JPU berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti ialah dakwaan primer pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Dia pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses kasus ini hingga upaya hukum terakhir. (apc/and)

Reporter: Ade Prasatia
Editor: Andhika





ADE/MKR

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Jatim saat melakukan olah TKP.

Olah TKP di Kamar Penemuan Mayat Kampung I Tarakan, Puslabfor Temukan Sperma dan Darah

TARAKAN - Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Jawa Timur menemukan sperma dan darah di spreng korban berinisial N (21), perempuan yang ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (26/8/2023) lalu.

Hal ini diungkapkan Kasubbid Kimia Biologi Forensik Bidlabfor Polda Jatim, AKBP Arif Andi Setiawan saat melakukan olah TKP di kamar korban Jalan Lumpuran RT 16 Kelurahan Kampung 1 Kota Tarakan, Rabu (30/8/2023).

“Tujuan melakukan olah TKP kembali, yakni untuk menyisir menemukan barang bukti mikro. Ada beberapa yang ketemu di spreng, spring bed atau kasurnya juga dengan menggunakan metode leuco-malachite green (LMG), kami juga menemukan bercak darah, kita akan cek itu profil siapa,” ujarnya.

AKBP Arif Andi Setiawan mengatakan, melalui screening tes dengan metode identifikasi sperma dan DNA, pihaknya sudah menemukan beberapa sample di spreng korban.

“Tetapi, itu untuk melakukan identifikasi DNA dari awal. Untuk bercak darah saya baru temukan di kasur di posisi kepala. Sesuai yang saya lihat

di foto ada muru-muru dari hidung yang sebelah kiri atau kanan mengalir merah,” katanya

Berangkat dari latar belakang profesi korban yang membuka jasa prostitusi online, pihak forensik mencoba memilah barang-barang milik korban.

“Walaupun dari profesinya korban ini kan banyak menerima pelanggan tamu laki-laki. Nah, mangkanya kita pilah-pilah. Dari TKP ini kita dapat barang-barang yang dilakukan olah TKP oleh pihak Polres,” ungkapnya.

Dalam hal ini, tim Labfor akan memaksimalkan apa yang telah diperoleh di TKP. Namun, ada beberapa opsi jika sidik jari tidak ditemukan dan sidik retina juga tidak ditemukan.

“Artinya kalau sidik jari tidak ketemu, sidik retina tidak ketemu ya DNA. Nah, saya pasti butuh pembandingan, pasti keluar semua profil DNA yang ada disini. Pembandingan ini nanti tugasnya pak Kasat Reskrim dan jajaran mengerucutkan itu,” tuturnya.

Dari hasil olah TKP, ada 26 barang bukti yang diamankan. Dari barang bukti tersebut, tim Puslabfor telah mengkategorikan (BB) yang pal-

ing urgent. Dengan harapan akan mengerucut ke profil DNA terduga tersangka.

“Yang terduga itu, artinya saya bisa ngasih profil dari hasil ini. Paling tidak, dari hasil ini ada langkah-langkah penyelidikan,” bebarnya.

Kemudian, AKBP Arif juga akan berkordinasi dengan dokter yang melakukan otopsi kepada korban. Sebab, ada dugaan lain yang masih perlu didalami dan dicurigai.

“Nanti saya juga akan tanyakan apa penyebabnya, saya juga akan berkordinasi dengan dokter terkait kondisi lambungnya. Siapa tau korban ini sebelum di bunuh di lemahkan terlebih dahulu, diminumkan apa sehingga dia tidak berdaya. Tapi saya agak heran, kok banyak orang di tetangga tidak ada suara kan. Apakah ini pembunuhan banyak, sehingga dia benar-benar tidak bisa bergerak. Kalau satu saya yakin pasti teriak-teriak, minimal minta tolong dan menjeritlah,” tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Yonsep.

Cegah Kebakaran, Pemkot Tarakan Akan Lakukan Penataan Ulang di Kawasan Pesisir

TARAKAN - Dalam beberapa bulan terakhir, Kota Tarakan dilanda musibah kebakaran yang di dominasi terjadi pada wilayah pesisir. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Yonsep mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan bersama instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPDB, PMK, dan lainnya akan melakukan perencanaan penataan kawasan pesisir.

Dalam perencanaan ini, ada beberapa hal yang menjadi atensi. Salah satunya, mendorong pengadaan pompa hydrant

di beberapa titik tertentu guna meminimalisir dampak dari kebakaran yang terjadi pada kawasan pesisir.

"Hydrant dibutuhkan untuk menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran. Dalam perencanaan nanti, akan ada pemasangan hydrant. Namun kami belum tahu pasti jumlahnya ada berapa," ucapnya, Kamis (31/8/2023).

Kemudian, salah satu kendala dalam hal evakuasi kebakaran adalah akses jalan yang tidak memungkinkan untuk kendaraan roda empat untuk bisa masuk menuju tempat kejadian perkara (TKP). Untuk itu, kata Yonsep, kedepan akan ada akses jalan

mobil di wilayah pesisir.

"Pak Wali Kota Tarakan berharap ada partisipasi masyarakat untuk memberikan sebagian lahannya untuk membangun infrastruktur jalan karena ini sangat perlu," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran. "Jangan sampai ada kelalaian, artinya perlu kesadaran masyarakat. Pastikan lampu dan kompor mati, semua yang sifatnya menggunakan tenaga listrik harus sudah mati," ungkapnya. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika



Benuanta Fest 2K23 : Targetkan Rekor Lomba Mancing Terpanjang

TANJUNGSSELOR – Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara merencanakan lomba mancing terpanjang di tepian Sungai Kayan. Dengan harapan dapat tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Bidang Pemasaran & Ekraf Dispar Kaltara, Ary Rifaldi H mengungkapkan jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke 11 Provinsi Kaltara banyak event yang bakal digelar. Salah satunya lomba mancing yang pada tahun lalu dibuka hingga 500 peserta.

“Tahun lalu Pak Gubernur ingin kita membuat fishing terbanyak dari ujung kampung arab hingga dekat pelabuhan. Tahun ini kita coba lagi, kita berharap dapat tercatat di

MURI,” kata Ary.

Selain itu, ada beberapa event yang juga akan digelar dengan nama Benuanta Fest 2K23, dengan konsep 7 FM merupakan akronim dari Film, Food, Folk, Fishing, Fashion, Fast on the Water, Fly on the Sky and Music.

Di mana terdapat 7 kegiatan Dispar yang akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari 29 Oktober hingga 4 November. “Untuk musik sama seperti tahun kemarin. Hanya saja untuk lagunya wajib membuat lagu ciptaan sendiri. Untuk lagu pilihan silakan disesuaikan. Nanti yang masuk 10 besar finalis akan kita masukan dalam album rekaman kompilasi, Album Kaltara Di Hati Jilid 1, dan pastinya juga akan ada penampilan Grup Band

Ibukota yang akan meriahkan acara Benuanta Fest 2K23 tahun ini,” katanya.

Untuk persiapannya, kata Ary, saat ini sedang berproses. Di mana para stakeholder terkait sedang menggelar rapat rutin untuk mempersiapkannya.

“Saat ini persiapan masih 25 persen, jadi ini masih proses dirapatkan. Jadi kita harapkan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi jadi dengan adanya ini membuka UMKM, kuliner orang berjualan kita harapkan dari pelaksanaan even ini terjadi perputaran ekonomi,” tuntasnya. (dkisp)



Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran

TANJUNG SELOR - Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.

Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini," ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.

Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun

2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengidentifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita," terangnya.

Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.

Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persen-

tasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita," katanya.

Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.

"Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting," ungkapnya.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.

“Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya khawatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.

“Namun, jika semua kabupat-

en/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut,” tambahnya.

Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinannya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.

Selain itu perbaikan institusi kelembagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di mas-

asyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. (dkisp)

Pengentasan Stunting di KTT Perlu Anggaran Tambahan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kaltara, terus intens untuk menurunkan angka stunting dengan terus sinergi dan berkolaborasi lintas kabupaten dan kota.

Wakil Bupati KTT, Hendrik menanggapi soal komitmen pemerintah dalam menekan angka stunting di Kaltara, bahwa di KTT, kata dia sudah ditunjuk sebagai lokasi fokus percepatan penurunan stunting pada tahun 2022.

Hal itu, berdasarkan keputusan menteri PPN Bapenas Nomor 10 tahun 2021, tentang penetapan penyebaran kabupaten dan kota, lokasi khusus intervalensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022.

Hendrik melanjutkan, dalam rangka penurunan angka stunting, Pemkab Tana Tidung telah melakukan beragam cara, salah satunya memperkuat kolaborasi tugas dan tanggungjawab TPPS Kabupaten dan Kota di Kaltara, hingga tingkat kelurahan dan Desa.

“Kita menargetkan penurunan stunting di tahun 2024 di KTT bisa zero kasus,” ujar Wakil Bupati KTT, Hendrik kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lanjutnya dengan menerapkan delapan program aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Termasuk, dengan cara peningkatan pengunjung balita di



MARTINUS/MKR

Wakil Bupati KTT, Hendrik berkomitmen turunkan angka stunting dengan konsep pentahelix.

posyandu sehingga dapat menopang capaian data program minimal 90 persen di tahun 2024.

“Termasuk kita akan meningkatkan pelayanan posyandu prima, untuk memantau tumbuh kembang anak yang bersifat efektif,” jelasnya.

Selanjutnya, akan difasilitasi pemenuhan alat ukur antropometri dan alat cek hemoglobin dan ultrasonografi pada setiap fasilitas kesehatan. “Kita menargetkan semua alat tersebut dapat dilengkapi hingga 100 persen di tahun 2024,” tukasnya.

Termasuk kemudian, akan diatur dari sisi regulasi pencegahan terha-

dap nikah dini, regulasi akan disusun mulai dari tingkat Kabupaten hingga provinsi. Juga pada penyampaian laporan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting tiap semester secara tepat waktu.

“Kita mengusulkan untuk meningkatkan anggaran alokasi intervalensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting, dengan mekanisme kerja berdasarkan konsep pentahelix,” tandasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Penormalan jaringan listrik oleh petugas PLN.

Pemeliharaan Listrik PLN UP3 Tanjung Selor Kembali Normal

TANJUNG SELOR - PLN UP3 Tanjung Selor kembali melakukan penormalan serta pemeliharaan jaringan di beberapa wilayah Kota Tanjung Selor dan sekitarnya.

Sehingga beberapa lokasi dilakukan pemadaman, namun sifatnya hanya untuk sementara waktu. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kaltara, Arief Prastyanto saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman itu dikarenakan adanya gangguan pembangkit, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan di wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya.

"Iya, saat ini kita tengah lakukan pemeliharaan, sehingga dilakukan pemadaman untuk wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya," ucap Arif, ke-

pada wartawan, Kamis (30/8/2023).

Dia melanjutkan, saat ini sedang dalam tahap investigasi oleh tim PLN, jika tidak ada kendala dalam proses penormalan maka sistem kelistrikan diupayakan untuk bisa masuk penormalan secara bertahap dalam waktu 3 jam.

"Kami mohon do'a dan support-nya, agar proses penormalan dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala," tukasnya.

Dia menuturkan, untuk pemadaman yang terjadi pada Rabu 29 Agustus malam, dikarenakan adanya gangguan pembangkit sehingga mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya. Namun, untuk update pada Kamis 31 Agustus sudah

kembali normal. "Update info 09.39 wita, sistem normal kembali," pungkasnya.

Soal informasi pemeliharaan ini, kata dia telah disampaikan kepada masyarakat secara luas dengan memasifkan media sosial yang ada. Diharapkan, adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat dengan menginformasikan kepada PLN jika dilapangan ada kabel PLN yang terganggu karena kondisi alam dan lain sebagainya. Karena, adanya faktor tersebut membuat PLN harus melakukan pemadaman pada wilayah tertentu. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Polda Kaltara inisiasi kegiatan Deklarasi damai, dengan libatkan seluruh peserta pemilu, tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Wujudkan Pemilu Aman dan Kondusif, Polda Kaltara Gelar Deklarasi Damai

TANJUNGSSELOR - Tahapan menuju perhelatan pesta demokrasi 2024 mulai terasa. Semua pihak bersama-sama gelar sosialisasi dan edukasi akan pentingnya pelaksanaan pesta lima tahunan ini berjalan aman, kondusif serta lancar.

Polda Kalimantan Utara (Kaltara) inisiasi adakan deklarasi pemilu yang aman, damai dan kondusif, dengan melibatkan seluruh peserta partai politik pada pemilu 2024, termasuk KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya.

KPU selaku penyelenggara pemilu, telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum Tahun 2024.

PKPU terbaru ini, mengatur beberapa metode kampanye, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyerahan bahan kampanye pemilu kepada umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dikesempatan itu menuturkan, kepolisian selaku penanggung jawab keamanan di wilayah hukum Kaltara, mengundang seluruh pihak terkait khususnya peserta pemilu untuk menyatukan sikap melalui deklarasi damai.

“Kita ingin memastikan selama berlangsungnya pelaksanaan tahapan pemilu 2024, harus berjalan

dengan aman, damai dan kondusif,” ujarnya.

Dia berharap, seluruh pihak yang ikut serta dalam kegiatan deklarasi pemilu damai secara bersama-sama dan berkomitmen wujudkan pemilu yang aman, damai dan kondusif. Tak lupa, dirinya menyampaikan ucapan syukur karena selama ini wilayah Kaltara dapat suksesi kegiatan serupa tanpa adanya gejolak yang men-

ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Semoga Tuhan yang maha esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, terutama dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika





Nunukan dan Malinau Dianggap Wilayah Rawan Pelanggaran Pemilu

TANJUNGSALOR – Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mendeteksi adanya wilayah rawan pemilu di Kaltara. Tercatat, Kabupaten Nunukan dan Malinau merupakan dua Kabupaten yang dianggap rawan menjelang perhelatan pesta demokrasi tahunan ini.

Direktur Intelkam Polda Kaltara, Kombes Pol Sigit Ari Widodo menuturkan, saat ini dinamika politik di Kaltara tergolong sangat dinamis. Bahkan terpantau adanya polarisasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing kelompok maupun individu.

Dia katakan, dinamika politik saat ini terlihat jelas sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat, untuk bersama sukseskan pesta demokrasi yang akan datang.

“Kita berharap seluruh stakeholder mampu berperan aktif dalam mewujudkan stabilitas dan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujarnya.

Saat ini, kata dia jumlah personel Polda Kaltara masih terbatas. Secara keseluruhan, jumlah personel Polda Kaltara sebanyak 3.000 orang. Tetapi, tidak semua dikerahkan untuk melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.

Perkuatan dua per tiga, dari jumlah keseluruhan personel akan ditempatkan di seluruh TPS. Kemudian, untuk pengamanan pelaksanaan kampanye dan lainnya. Pasalnya penempatan personel kepolisian bakal dipetakan pada beberapa wilayah tertentu.

Soal kerawanan pemilu di Kaltara, kata dia berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Wilayah pelosok di Malinau dinilai sangat rawan pelanggaran pemilu. Hal itu dikarenakan, secara geografis sangat jauh. Sehingga, dalam proses pendistribusian logistik dinilai sangat rawan dan perlu pengamanan yang lebih.

Pengamanan di wilayah pelosok ini nantinya sifatnya bakal diprioritaskan. Tidak hanya itu, wilayah per-

batasan Nunukan juga memiliki tingkat kerawanan tinggi. Namun, karakteristiknya bervariasi. “Semua harus kita perhitungkan agar pengamanan bisa tepat sasaran,” tukasnya.

Sehingga, penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, tertib dan damai. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat diminta untuk tidak mudah termakan berita hoax melalui media sosial (medsos) atau saluran informasi lainnya.

Informasi yang tidak benar, ditelan secara mentah-mentah bakal menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini, lanjut dia banyak persoalan yang dijadikan ajang untuk mengadu domba. “Mudah-mudahan berita hoax untuk menebar ujaran kebencian di medsos tidak terjadi di lagi di Kaltara,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



DEBIT AIR MENYUSUT, DISTRIBUSI DIGILIR SAMPAI DIHENTIKAN

BACA HALAMAN 2-4



**KARHUTLA TERJADI LAGI
DI RT 16 PETUNG, BUTUH
7,5 JAM MEMADAMKAN
BACA HALAMAN 35**



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kondisi sumber air baku IPA Sotek yang mengalami penyusutan signifikan.

Debit Air Baku PAM Danum Taka Menyusut

Distribusi Digilir sampai Dihentikan Sementara

PPU-Debit air di seluruh unit Instalasi pengolahan air (IPA) di Penajam Paser Utara (PPU) terus menyusut. Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka terpaksa menempuh upaya ekstrem untuk menjaga performa pelayanan mereka terus optimal.

Situasi musim kemarau yang berkolaborasi dengan cuaca ekstrem El-Nino berdampak tidak main-main ke daerah berjuluk Benuo Taka. Di samping sederet kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), potensi krisis air sejurus mengemuka.

Menurut data, semua IPA yang dikelola terus menerus mengalami penurunan dengan laju penurunan debit air baku pada semua unit mengalami penurunan hingga 10 persen sampai 80 persen.

IPA Sotek mengalami penurunan 60 sentimeter, Waru dan Maridan turun 10 sentimeter, Lawe-Lawe 25 sentimeter, kemudian di Sepaku mengalami penurunan hingga 50 sentimeter.

“Dan cenderung turun terus. Diperkirakan akan terus mengalami penurunan apabila dalam beberapa minggu ke depan tidak terjadi curah hujan,” ujar Direktur PAM Danum Taka, Abdul Rasyid.

Ada dua langkah yang diambil BUMD PPU ini dalam menyikapi kejadian ini. Pertama dengan menghentikan pendistribusian air bersih pada 805 sambungan rumah (SR) di Kelurahan Sotek, Penajam.

Sebab, jika dipaksakan terus beroperasi dengan air baku yang minim, maka berpotensi menimbulkan kerusakan pada IPA Sotek. “Penghen-

tian bersifat sementara, sudah Kami off-kan sejak tanggal 19 Agustus,” sebutnya.

Kemudian menerapkan pola bergilir untuk menyalurkan air bersih pada seluruh pelanggan.”Lalu dengan kondisi tidak normal saat ini, pendistribusian air bersih dilakukan bergilir agar seluruh pelanggan bisa mendapatkan pasokan air bersih,” sambungnya.

Tak tinggal diam, PAM Danum Taka juga sudah dan tengah melakukan upaya peningkatan air baku. Salah satunya dengan memperdalam kapasitas penampungan.

Pendalaman itu agar debit air baku tetap mencukupi terutama saat puncak musim kemarau. “Kami melakukan perluasan dan pendalaman embung Sotek. Kami terus melakukan rapat evaluasi bersama pemerintah

daerah menyangkut kondisi saat ini,” sebut Rasyid.

Rasyid meminta seluruh pelanggan memahami kondisi ini, dilakukan agar seluruh pelanggan dapat pasokan saat kemarau. Selain itu, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih, sekaligus menampung air bersih.

Kemudian, berharap sumber air baku yang digunakan pada IPA perusahaan pelat merah itu, yakni air hujan, bisa segera terjadi. “Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan air bersih pada saat musim kemarau. Apalagi saat puncak musim kemarau pada September,” pungkaskan Rasyid.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



KELURAHAN SOTEK FOR RADAR MEDIA

Deretan mobil angkutan air bersih tandonan di Kelurahan Sotek.

Layanan Air Bersih Dihentikan, Warga Sotek Terpaksa Beli Air Tandon

PPU-Layanan air bersih ke wilayah Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) berhenti. Hal ini membuat masyarakat di

sanakesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan beralih ke membeli air tandonan.

Seperti diketahui, sejak 19 Agus-

tus lalu Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka memutuskan sementara pelayanan 805 sambungan rumah (SR) yang menerima distribusi dari

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sotek. Alasannya karena musim kemarau kali ini mengakibatkan penyusutan debit air signifikan.

"Benar, kondisi PDAM unit Sotek untuk saat ini menghentikan sementara layanan air bersih, dikarenakan waduk yang menjadi sumber airnya kering akibat pendangkalan dan kemarau," ujar Lurah Sotek Muhammad Harianto, Kamis (31/8/2023).

Ia juga mengakui hal ini membuat masyarakat harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehari-hari. Di antaranya ialah memanfaatkan adanya beberapa sumur bor serta membeli air bersih tandon yang menggunakan mobil pick-up.

"Sementara ini warga memanfaatkan sumber air sumur bor dan membeli air bersih dengan menggunakan mobil pick up, agar kiranya warga tidak mengalami krisis air bersih," ungkapnya.

Tentu warga akhirnya merogoh kocek lebih dalam karenanya. Harianto menyebutkan biasanya pembelian air bersih tersebut seharga kisaran Rp 70 ribu sampai dengan Rp 80 ribu per tandonnya.

Selain itu, pihaknya juga sampai saat ini masih mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi. Dengan membuka akses dan berkomunikasi dengan para pemilik kolam atau waduk yang ada di beberapa lokasi di Sotek.

"Terus dilakukan agar warga dapat memanfaatkan airnya untuk kepentingan rumah tangga khususnya," ujarnya.

Dalam hal ini pula, Kelurahan Sotek juga mengharapkan kerja cepat pihak PAM Danum Taka dalam melakukan pengerukan dan pembersihan waduk. Serta untuk segera membangun pintu air pembuangan, agar debit air yang ada di Waduk Sotek bisa segera dikendalikan.

"Sampai saat ini kan waduk yang di miliki PDAM tidak memiliki pintu air pembuangan. Jadi tidak bisa dikendalikan. Bagaimana mau mengendalikan pintu air tidak ada, jadi kemarau baru satu bulan air sudah menyusut," tegas Herianto.

Diberitakan sebelumnya, Direktur PAM Danum Taka, Abdul Rasyid menjelaskan pihaknya terpaksa menempuh jalur ini. Penurunan debit air di Waduk Sotek dianggap tidak memberikan pilihan lain selain menghentikan pendistribusian sementara.

"jika dipaksakan terus beroperasi dengan air baku yang minim, maka berpotensi menimbulkan kerusakan pada mesin IPA Sotek. Kami meminta masyarakat memahami kondisi tidak normal ini. Semoga dalam waktu dekat curah hujan meningkat," tutupnya. (NRD)





SPECIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088




Drusan Toyota lebih mudah!



MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENDUKUNG RANGKAIAN ACARA **HUT MEDIA KALTIM KE-3**

HINGGA PADA ACARA PUNCAK MINGGU, 27 AGUSTUS 2023
DI LAPANGAN EKS. BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

THE TALK SHOW
**PARIWISATA KALTIM
GO DIGITAL
GO GLOBAL**

KALTIM FEST - CONVENTION HALL SAMARINDA
JUMAT 14 JULI 2023



THE TALK SHOW

EKSISTENSI KOPI UKM DITENGAH
DOMINASI KEDAI KOPI MODERN

**CUAN DARI
NGOPI**



SABTU 15 JULI 2023 PKL. 14.00 - 16.00



**OPEN TOURNAMENT
MINI SOCCER**
MEDIA KALTIM CUP



TENGGARONG, 11-13 AGUSTUS 2023



PESCOMPETITION
TENGGARONG, 6 AGUSTUS 2023



**LOMBA
VIDEO
MEDSOS**





Benuanta Fest 2K23 : Targetkan Rekor Lomba Mancing Terpanjang

TANJUNGSALOR – Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara merencanakan lomba mancing terpanjang di tepian Sungai Kayan. Dengan harapan dapat tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Bidang Pemasaran & Ekraf Dispar Kaltara, Ary Rifaldi H mengungkapkan jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke 11 Provinsi Kaltara banyak event yang bakal digelar. Salah satunya lomba mancing yang pada tahun lalu dibuka hingga 500 peserta.

“Tahun lalu Pak Gubernur ingin kita membuat fishing terbanyak dari ujung kampung arab hingga dekat pelabuhan. Tahun ini kita coba lagi, kita berharap dapat tercatat di MURI,”

kata Ary.

Selain itu, ada beberapa event yang juga akan digelar dengan nama Benuanta Fest 2K23, dengan konsep 7 FM merupakan akronim dari Film, Food, Folk, Fishing, Fashion, Fast on the Water, Fly on the Sky and Music.

Di mana terdapat 7 kegiatan Dispar yang akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari 29 Oktober hingga 4 November. “Untuk musik sama seperti tahun kemarin. Hanya saja untuk lagunya wajib membuat lagu ciptaan sendiri. Untuk lagu pilihan silakan disesuaikan. Nanti yang masuk 10 besar finalis akan kita masukan dalam album rekaman kompilasi, Album Kaltara Di Hati Jilid 1, dan pastinya juga akan ada penampilan

Grup Band Ibukota yang akan meriahkan acara Benuanta Fest 2K23 tahun ini,” katanya.

Untuk persiapannya, kata Ary, saat ini sedang berproses. Di mana para stakeholder terkait sedang menggelar rapat rutin untuk mempersiapkannya.

“Saat ini persiapan masih 25 persen, jadi ini masih proses dirapatkan. Jadi kita harapkan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi jadi dengan adanya ini membuka UMKM, kuliner orang berjualan kita harapkan dari pelaksanaan even ini terjadi perputaran ekonomi,” tuntasnya. **(dkisp)**



DEKLARASI: Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si memimpin deklarasi Finalisasi Dokumen RZWP3K.

Pimpin Deklarasi Dokumen RZWP3K

TANJUNG SELOR - Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, SE., M.Si mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memimpin rangka kegiatan deklarasi final materi teknis perairan pesisir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara.

Dalam acara deklarasi ini turut hadir perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, M. Yusuf Eko Budiutomo sekaligus Tim Kelompok Kerja Zonasi Daerah, juga hadir Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Teknis penyusun materi teknis muatan perairan, dan seluruh unsur opd terkait.

“Saya berharap dokumen materi teknis perairan pesisir ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif. Sehingga diperoleh manfaat baik dari aspek ekonomi sosial dan lingkungan,” kata Bustan.

Dia menjelaskan pelaksanaan Deklarasi Final RZWP3K ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi teknis Pemprov Kaltara dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 15 Agustus 2023 di Jakarta.

Bustan menjelaskan bahwa dokumen RZWP3K Kaltara merupakan perbaikan terhadap dokumen sebelumnya yang telah ditetapkan menja-

di Perda Nomor 4 Tahun 2018.

Deklarasi ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan rencana tata ruang keterpaduan keserasian antara struktur ruang, pola ruang penyesuaian antara kehidupan manusia dengan lingkungan perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah.

“Saya berharap sekali deklarasi ini dapat segera mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sehingga dapat diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara,” tutupnya. **(dkisp)**



Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran

TANJUNG SELOR - Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.

Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini," ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.

Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas

nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengidentifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat

pemerintah kita," terangnya.

Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.

Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita," katanya.

Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang

Tuhan berikan setiap harinya.

"Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting," ungkapnya.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.

"Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Na-

mun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya khawatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat," jelasnya.

"Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut," tambahnya.

Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinannya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.

Selain itu perbaikan institusi ke-lambagaan tidak hanya ditatanan

birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. "Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah," lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. "Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi," pungkasnya.

Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. (dkisp)





Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam

Pengembangan Pulau Gusung Sebagai Destinasi Wisata, Begini Pendapat Anggota DPRD Rustam

BONTANG - Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan Pulau Gusung sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang.

Ia menganggap potensi sumber daya dan kearifan lokal yang ada di Pulau Gusung sangat berpotensi untuk dimanfaatkan secara lebih maksimal.

"Secara pribadi saya sangat mendukung, apalagi potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal," tegasnya.

Selain mendukung, Rustam juga menekankan pentingnya membenah-

hi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung agar menjadi lokasi wisata yang layak.

Upaya ini dianggap sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan pendapatan sektor UMKM dan pariwisata.

Lebih lanjut, Rustam berharap agar pemerintah daerah juga memprioritaskan pembenahan aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang mendukung pengembangan potensi wisata di Pulau Gusung. Menurutnya, hal ini penting agar pengunjung yang datang merasa puas dan nyaman.

"Jangansampai kita ingin mengembangkan wisatanya, tetapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan

diabaikan. Semua ini harus sejalan, agar pengunjung yang datang tidak kecewa," tegas Rustam.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem, menjelaskan bahwa rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung sedang dalam tahap penggodokan.

Tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIP-OW) Pulau Gusung juga hampir rampung. "Kami akan mengembangkan semua daerah yang berpotensi, seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami berharap Pulau Gusung bisa menjadi destinasi seperti Malahing," ujar Ahmad Aznem. (MK/ADV)



Anggota DPRD Nursalam (kanan) mendukung salah satu waralaba terkenal dari Amerika, McDonald's, yang dalam waktu dekat akan membuka gerai baru di kawasan Jalan Ahmad Yani.

McDonald's Segera Hadir di Bontang, Nursalam Beri Dukungan, Ini Alasannya

BONTANG - Salah satu waralaba terkenal dari Amerika, McDonald's, dalam waktu dekat akan membuka gerai baru di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bontang Utara. Tepatnya di kawasan Kenari Waterpark. Saat ini, proses pembangunan gerai sedang berlangsung, dengan target selesai pada Oktober 2023 mendatang.

McDonald's sebelumnya telah mengantongi izin operasi yang diperlukan di Bontang. Izin-izin tersebut mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin),

Siteplan, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, menyatakan dukungannya terhadap hadirnya gerai McDonald's. Sebab, kata politisi asal Partai Golkar ini, akan memberikan peluang kerja kepada masyarakat dan bisa berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kota Bontang.

"Kalau mempekerjakan masyarakat, ini bisa meningkatkan perkembangan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran,"

ungkap Nursalam kepada wartawan.

Menurutnya kehadiran gerai makanan cepat saji ini juga mendukung investasi di Kota Bontang. "Ini sangat potensial untuk membuka peluang dan meningkatkan investasi di Kota Bontang. Selaras dengan visi misi Pemerintah Kota, yaitu menjadi kota yang ramah terhadap investasi," sebutnya.

Pembukaan gerai McDonald's di Bontang juga diharapkan dapat memberikan variasi lebih dalam pilihan kuliner bagi masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Kota Taman. (MK/ADV)



Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yasser Arafat

Yasser Arafat Dukung Usulan Pemindahan Kantor Kelurahan Berbas Pantai ke Pujasera

BONTANG - Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yasser Arafat, mendukung usulan pemindahan kantor Kelurahan Berbas Pantai ke lantai 2 pujasera. Menurutnya, langkah ini akan membantu menghemat anggaran karena tidak perlu lagi mengeluarkan dana sewa tempat.

"Kalau saya pribadi sangat men-support adanya usulan tersebut karena itu juga bisa menghemat anggaran, dan anggaran untuk sewanya itu kan bisa dialihkan ke yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Selain aspek penghematan anggaran, Yasser juga berpendapat bahwa pemindahan kelurahan ke lantai 2 pujasera akan meningkatkan kesadaran pedagang dalam menjalankan usahanya dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Jadi secara tidak langsung bisa membantu perekonomian masyarakat disekitar pujasera, dan fasilitas penunjang seperti air, toilet umum, dan listrik akan diperhatikan," ungkapnya.

Namun demikian, Lurah Berbas Pantai, Supriadi, mengatakan pihaknya masih akan meninjau ulang usulan tersebut. Sebab, pemindahan baru bisa dilakukan setelah masa sewa kantor berakhir, yang dijadwalkan akhir tahun mendatang.

"Proses sewa kantor yang saat ini ditempati masih berjalan, jadi nanti kami usulkan setelah mendekati masa sewa berakhir," kata Supriadi.

Pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai tahun ini mengalami penundaan karena lahan yang akan digunakan digugat oleh seorang

warga ke Pengadilan Negeri (PN) Bontang. Sengketa ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2023/PN Bon.

Penggugat mengklaim bahwa lahan seluas 1.045,5 meter persegi tersebut adalah miliknya berdasarkan surat akta jual beli tanah tahun 1982. Penggugat juga meminta pembayaran kerugian sebesar Rp 2.613.750.000 dan biaya kerugian materiil sebesar Rp 1 miliar, serta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

Meskipun mediasi telah dilakukan oleh hakim, upaya tersebut tidak berhasil, dan proses peradilan masih berlangsung dalam tahap pembuktian dokumen surat yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat. (ADV/MK)



Peningkatan Kualitas MTQ, Pemkot Bontang Jalin Kerjasama dengan PTIQ Jakarta

BONTANG - Pemkot Bontang terus mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Salah satunya mengadakan koordinasi dan audiensi dengan Ma'had Al Quran Universitas PTIQ Jakarta pada Kamis (31/08/2023).

Pertemuan ini berlangsung di Auditorium PTIQ Jakarta dan merupakan langkah konkret yang diambil sebagai respons atas rekomendasi dari Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Bontang pada tahun 2022.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang, Dasuki, membahas dua agenda utama terkait

MTQ di Kota Bontang.

Pertama, membahas implementasi aplikasi e-MTQ dan bagaimana model terbaik untuk mengadopsinya. Kedua, pemerintah berkeinginan untuk menyelenggarakan pelatihan internal bagi dewan hakim MTQ untuk meningkatkan kompetensi mereka dan bahkan mencapai sertifikasi.

"Kami bertekad untuk menjalankan MTQ dengan kualitas dan objektivitas yang tinggi di Kota Bontang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi kami menghasilkan peserta yang berkualitas," kata Dasuki, yang juga menjabat sebagai Wakil Harian LPTQ Bontang.

Hasil dari audiensi ini adalah rencana Pemkot Bontang untuk memberikan orientasi dan pelatihan bagi

dewan hakim MTQ di masa yang akan datang.

Pemkot juga siap untuk menerapkan E-MTQ sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. "Langkah-langkah ini kita ambil untuk memastikan bahwa penyelenggaraan MTQ di Kota Bontang terus meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," sebutnya.

Rombongan Pemkot Bontang yang menghadiri pertemuan ini mencakup Kabag Kesra Jayadi Pulung yang juga menjabat sebagai Ketua 2 LPTQ, Ketua LPTQ 3 M. Bahri, Sekretaris Umum LPTQ Sultani, Sekretaris 1 LPTQ Iji Jayusman, serta Bendahara LPTQ Devi Yuliana. (kmf/adv)

Editor: Agus Susanto



ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (baju putih) saat menghadiri Launching Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Panji.

Ketua DPRD Rasid Hadiri Launching Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Panji

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menghadiri langsung pencahangan dan launching Kampung Bebas Narkoba yang dilaksanakan di Taman Miana, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong. Kampung Bebas Narkoba sendiri, merupakan program milik Polres Kukar, dalam hal menekan peredaran dan praktik narkoba.

Launching langsung dilakukan oleh Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena. Sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Satgas Anti Narkoba dan pemberian piagam penghargaan.

Hari Rosena menjelaskan, Kampung Bebas Narkoba ini menja-

di langkah konkret dan terobosan kreatif dalam membina masyarakat. Sembari melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Dengan adanya Kampung Bebas Narkoba kita semua mengharapkan Kelurahan Panji ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi kelurahan dan desa lainnya sebagai ujung tombak dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba," ujar Hari Rosena, Kamis (31/8/2023).

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengharapkan dengan adanya Kampung Bebas Narkoba bisa menjadi langkah awal dalam

mewujudkan kawasan bebas narkoba. Karena memang perlu kerjasama seluruh pihak, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di Kukar.

"Kelurahan Panji juga bisa menjadi contoh kelurahan dan desa lainnya di Kukar agar terbebas dari narkoba," ujar Rasid.

"Memang berat, tapi semoga masyarakat khususnya di Kelurahan Panji menyadari betapa bahayanya narkoba di masyarakat," tutup Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi.

Wakil Ketua Alif Apresiasi Penanganan Stunting di Kukar

TENGGARONG - Masalah stunting, menjadi salah satu fokus yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Bahkan inipun sudah menjadi isu nasional, bagaimana tidak hanya di Kukar saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia.

Maka perlu ada langkah konkret, inovasi dan terobosan yang harus dilakukan. Lebih-lebih Kukar memiliki anggaran yang terbilang besar pada tahun 2023 ini, mencapai Rp 11,8 triliun.

"Ini menjadi perhatian kita bersama masalah stunting di Kukar, dan terobosan yang dilakukan Pemkab Kukar untuk menangani stunting sudah banyak, dana juga sudah kami alokasikan untuk penanganan stunting di setiap desa," jelas Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi.

Meski penanganan yang ada saat ini terbilang baik, namun Alif mengatakan, perlu menambah pendekatan yang lebih komprehensif lagi. Di dalamnya mencakup peningkatan kualitas gizi, edukasi kepada masyarakat,

di samping peningkatan sarana dan prasarana pencegahannya.

"Kami berharap terus mengambil langkah konkret dalam menjaga perkembangan anak-anak Kukar, dengan tujuan mengurangi angka stunting dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Wabup Kukar, Rendi Solihin, saat menyerahkan bantuan kepada nelayan di Kelurahan Sangasanga Muara.

Tingkatkan Kapasitas Nelayan, Wabup Kukar Serahkan Puluhan Mesin di Sangasanga

TENGGARONG - Bantuan sarana dan prasarana (saprass) sektor perikanan terus dibagikan kepada para nelayan. Realisasi Bantuan Saprass Produksi kepada 25 ribu nelayan produktif di Kukar diserahkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), melalui Wabup Kukar, Rendi Solihin.

Tepatnya kepada puluhan kelompok nelayan yang berada di kawasan Kelurahan Sangasanga Muara, Kecamatan Sangasanga, Kukar.

Bantuan inipun cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Inung, koordinator Nelayan Sangasanga Muara berupa puluhan mesin kapal untuk nelayan.

"Ada 50 mesin kapal yang diberikan oleh Pak Wabup. Kami sangat

berterima kasih, bantuan ini sangat membantu nelayan untuk mencari ikan dan udang di lautan," ucap Inung.

Menanggapi hal itu, Wabup Kukar, Rendi Solihin, mengatakan jika Pemkab Kukar terus menyiapkan alokasi bantuan yang sudah terprogram dalam Visi Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2022-2026. Yakni peningkatan pembangunan pertanian berbasis kawasan. Bantuan yang digelontorkan berupa mesin, perahu, dan alat tangkap ikan.

"Semua untuk menunjang perekonomian masyarakat. Ini masih menjadi usulan prioritas dan menjadi agenda Pemkab Kukar yang bisa terrealisasi sampai 2024," ungkapnya.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar pada 2021

ada sekitar 7 ribu nelayan dan pembudidaya telah menerima manfaat. Dengan anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 130 miliar.

Pada 2022 anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 180 miliar, dialokasikan untuk memberikan manfaat kepada 8.500 nelayan dan pembudidaya. Sementara, pada 2023, tersedia anggaran sebesar Rp 219 miliar untuk 9.500 nelayan di seluruh Kukar.

"Hingga 2023, sudah ada 20 ribu nelayan produktif yang menerima manfaat sejak Edi-Rendi dilantik. PR kami masih ada 5 ribu nelayan lagi dan kami optimis sampai akhir tahun semua tuntas," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Rapat paripurna Raperda Perubahan APBD 2023 di gedung DPRD Berau, Kamis (31/8/2023).

Bupati Berau: Raperda Perubahan APBD 2023 Sudah 3 Kali Pergeseran

TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun anggaran 2023 kembali mengalami perubahan, lantaran tidak sesuai dengan Kebijakan Anggaran Umum (KUA). Perubahan tersebut telah terjadi selama 3 kali.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2023 tersebut disampaikan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih pada rapat paripurna di gedung DPRD Berau, Kamis (31/8/2023).

Pada pelaksanaan APBD hingga pertengahan tahun anggaran 2023 telah terjadi perubahan-perubahan asumsi pada Kebijakan Umum APBD 2023, yaitu terjadinya penambahan target pendapatan daerah disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF.

Kemudian, Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor S-349/WPB.20/2023

tanggal 24 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer Ke Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2022.

Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.116/2023 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/kota Se Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

"Pun pada belanja terjadi penambahan belanja dan penggunaan penerimaan pembiayaan yang akan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2023, serta pengeluaran pembiayaan," katanya, Kamis (31/8/2023).

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD 2022 harus dilakukan perubahan pada beberapa

pa program dan kegiatan tapi tetap mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Berau 2023.

"Selama 2023 ini telah terjadi pergeseran anggaran sebanyak 3 kali yang ditetapkan dengan Perubahan Perbup Berau tentang Penjabaran APBD 2023," sebutnya.

Pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka keperluan belanja mendesak akibat bencana alam serta adanya kekurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS dan DPRD serta Tambahan Penghasilan PNS (TPP).

Lebih lanjut juga soal pengalokasian belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari sisa dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR) yang masih ada di kas daerah serta dana yang bersumber dari program PCPF.

Adapun rancangan perubahan APBD 2023 sebesar Rp 5,174 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah menjadi Rp 4,374 triliun dari sebelumnya Rp 3,639 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari PAD setelah perubahan



yakni Rp 259 miliar dari sebelumnya Rp 240 miliar. Kenaikan PAD tersebut berasal dari, pajak daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lalu pendapatan transfer dibagi menjadi dua yakni transfer pemerintah pusat Rp 3,323 triliun dari semula Rp 2,774 triliun. Dan transfer antar daerah sebesar Rp 739 miliar dari sebelumnya Rp 623 miliar.

Selain pendapatan daerah, ada juga belanja daerah sebesar Rp 5,174 triliun dari sebelumnya Rp 3,639 triliun. Terjadi kenaikan sebesar Rp 1,535 triliun.

“Yang mana salah satu prioritas belanja perubahan 2023 akan diar-

ahkan pada pengalokasian anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan MOU antara Kepala Daerah dan DPRD,” paparnya.

Terakhir pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan khususnya SiLPA tahun anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 802 miliar. Di mana pada APBD murni 2023 tidak dianggarkan SiLPA tahun 2022. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 2 miliar.

“Terjadi defisit setelah perubahan sebesar Rp 800 miliar. Itu akan ditutupi melalui pembiayaan yang dananya berasal dari SiLPA tahun

sebelumnya,” terangnya.

Dikatakannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah siap sepenuhnya bersama Badan Anggaran DPRD untuk membahas rancangan Perubahan APBD 2023. Ia berharap, pembahasan nantinya dapat diselesaikan tepat waktu.

“Sehingga setiap program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan,” tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

**JALAN SANTAI
DALAM RANGKA
GRAND OPENING GEDUNG NASIONAL**

**JAM 06.00-SELESAI
MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023**

GEDUNG NASIONAL SAMARINDA
Jl. Panglima Batur No.118, Pelabuhan

DOORPRIZE

GUEST STAR
KATUJU
ZIN LIA
ZIN WENI

SPONSORED BY: ima

MEDIA PARTNER: KATUJU

ORGANIZED BY: KATUJU

SUPPORTED BY: frplus



Bupati Berau Sri Juniarsih merotasi 40 ASN di lingkungan Pemkab Berau.

Rotasi 40 ASN, Bupati Berau Tekankan Loyalitas dan Kinerja Terbaik

TANJUNG REDEB - Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dirotasi. Yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional.

Tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik di antaranya, Endah Ernany Triariani, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Baplitbang Berau dilantik menjadi Kepala Baplitbang Berau.

Warji, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPMK Berau menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Berau. Terakhir, Zulkifli Azhari sebelumnya Sekretaris Kesbangpol Berau dilantik sebagai Kepala Disnakertrans Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih meminta, para ASN yang dimutasi dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya, untuk kemajuan tata kelola pemerintahan Kabupaten Berau.

“Saya harap dapat memberikan ki-

nerja terbaik yang berorientasi dan memiliki loyalitas tinggi di bidangnya masing-masing, terutama dalam meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan sosial masyarakat Berau,” harapnya, Kamis (31/8/2023).

Ia juga mengajak untuk menyukkseskan visi, misi dan 18 program prioritas Pemkab Berau. Serta menumbuhkan atmosfer kerja yang berorientasi pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepintaran bukan tanda kesuksesan tapi ia lebih menekankan loyalitas, disiplin, dan gerak cepat yang menjadi indikator utama terhadap seluruh pegawai Pemkab Berau.

“Saya tidak ingin beberapa mutasi jabatan yang cukup strategis kali ini hanya menjadi batu loncatan. Atau ingin sekedar duduk di jabatan itu tapi loyalitas dan kedisiplinan tidak dilakukan,” jelasnya.

Kepala Disnakertrans Berau yang baru dilantik, Zulkifli Azhari menyampaikannya, tentu dirinya akan melaksanakan visi, misi dan 18 program

prioritas Pemkab Berau. Terutama soal balai latihan kerja gratis bagi masyarakat di Kabupaten Berau.

“Pun masalah-masalah lain yang menjadi wewenang Disnakertrans Berau. Seperti hubungan industrial yang berkeadilan, dan sesuai dengan amanat UU yang berlaku,” sambungnya.

Zulkifli juga berkeinginan untuk mengoptimalkan pasar kerja di mana tenaga kerja lokal dapat terserap dan bisa diterima di pasar kerja. Melalui kerja sama dengan stakeholder terkait. Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada.

“Sesuai Perda Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang tenaga kerja lokal. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan kerjasama semua perusahaan di Bumi Batiwakkal. Serta meningkatkan mutu tenaga kerja itu sendiri,” tutupnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari

Agus Wahyudi Resmi Purna Tugas, Posisi Sekda Berau Bakal Diisi Plt

TANJUNG REDEB - Agus Wahyudi sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Berau resmi purna tugas pada Kamis (31/8/2023), setelah menjabat selama 8 bulan lamanya.

Sementara, posisi Sekda Berau bakal kosong pada Jumat (1/9/2023) dan akan diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt). Namun hingga saat ini belum ada yang ditunjuk langsung oleh Bupati Berau.

Itu disampaikan oleh Kabid Mutasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Iwan Setiawan.

"Soal Plt Sekda Berau, Bupati Berau tinggal menunjuk saja. Tapi sampai sekarang memang belum. Kemungkinan besok baru kita tahu. Karena hari ini hari terakhir Pj Sekda Berau menjabat," ungkapnya, Kamis (31/8/2023).

Dijelaskannya, jabatan tersebut tidak akan dibiarkan kosong. Dipastikan akan diisi oleh Plt Sekda Berau. Yang mana maksimal jabatan Plt yakni enam bulan.

"Tidak sampai jabatan Plt habis, Insya Allah akan terpilih Sekda baru dalam waktu 1-2 bulan ke depan," jelasnya.

Apalagi seleksi terbuka Sekda Berau masih terus berlangsung. Adapun 8 peserta dinyatakan terdaftar sebagai bakal calon Sekda Berau. Berdasarkan jadwal seleksi, pada 2 September para peserta akan melakukan presentasi makalah.

"Setelah itu asesmen dan uji kompetensi yang dilakukan BKD Makassar yang telah memiliki lembaga asesor," sebutnya.

"Terakhir wawancara dan hasil akhirnya bakal diumumkan pada akhir September mendatang," pungkasnya.



Kabid Mutasi Aparatur BKPP Berau, Iwan Setiawan

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

**10
09
2023**

**REUNI
SMK PERTIWI**
Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

**Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize**

**Only
Rp. 50k**

Konfirmasi kehadiran : Masneh 081252119669

Kemunculan Buaya di Pantai Balikpapan, BKSDA Siapkan Rencana Relokasi

BALIKPAPAN - Munculnya buaya muara di pantai Balikpapan dalam beberapa hari terakhir ini seolah membuat teror baru. Langkahantisipasi pun telah dilakukan agar tidak timbul korban jiwa. Seperti pemasangan baliho di sejumlah titik tempat munculnya buaya muara berukuran 3 meter.

Munculnya buaya muara ini pun mendapat perhatian dari Seksi Konservasi Daya Alam III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim.

Polisi Hutan Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, Tri Agus Cahyono mengatakan, pihaknya telah berencana untuk merelokasi buaya yang muncul di pantai Balikpapan tersebut.

"Kalau sekarang tidak. Kalau nanti dari pantauan buaya masih terus menerus muncul, kami siapkan opsi merelokasi buaya ke penangkaran atau nanti menghalau buaya itu," ujarnya Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, BKSDA Kaltim telah menurunkan tim kelokasi kemunculan buaya sejak Selasa (29/8/2023) kemarin. Tim ini telah memantau lokasi mana saja yang sering didatangi, termasuk meminta keterangan saksi-saksi.

"Kami juga sudah meminta keterangan warga di sekitar lokasi," jelasnya.

Dari analisa video warga yang beredar di masyarakat tersebut, buaya muara ini diperkirakan memiliki panjang 2 hingga 3 meter, dengan kemungkinan usia 4 sampai 5 tahunan.

"Itu jenis buaya muara yang lagi viral di Balikpapan," tambahnya.

Menurut Agus, kemunculan buaya di pesisir pantai Balikpapan sejatinya bukanlah hal yang baru. Selain di sekitar kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan, BKSDA Kaltim juga mencatat bahwa buaya pernah muncul di Pantai Manggar, Sungai Aji Raden hingga di kawasan sungai Sepinggan.

"Karena memang sebenarnya kawasan pesisir terutama muara sun-

gai ini kan merupakan habitatnya buaya muara," ujarnya lagi.

Untuk sementara waktu, BKSDA Kaltim juga meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lokasi kemunculan buaya

"Kemarin juga sudah ada spanduk peringatannya. Jadi kami minta warga untuk tetap waspada," tegasnya.

Selain itu, kemunculan buaya di ka-

wasan pesisir Balikpapan yang dekat dengan permukiman warga diakuinya, bahwa fenomena itu tak lepas dari kondisi habitat buaya di kawasan Teluk Balikpapan yang mulai rusak.

"Pasti ada pengaruh (kerusakan habitat), karena mungkin saja sarang mereka sekarang menjadi kawasan industri," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Polisi Hutan Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim Tri Agus Cahyono.



Puluhan masyarakat Kota Balikpapan yang tergabung dalam Ormas Kedaerahan, LSM dan Serikat Pekerja Balikpapan saat melakukan aksi demi di depan Proyek RDMP.

Tuntut Lapangan Pekerjaan di RDMP, Ratusan Warga Balikpapan Gelar Demo

BALIKPAPAN-Ratusan masyarakat Kota Balikpapan yang tergabung dalam sejumlah Ormas Kedaerahan, LSM dan Serikat Buruh Balikpapan menggelar aksi demonstrasi di kawasan bundaran Karang Anyar, atau tepatnya di depan pintu RDMP, pada Kamis (31/8/2023).

Salah satu Korlap Aksi, Andi Syamsir mengatakan, bahwa mereka menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah khususnya Kota Balikpapan di dalam proyek strategis nasional, yakni proyek RDMP.

"Hari ini tuntutan kita ya mengacu kepada tenaga kerja lokal harus lebih banyak. Bukannya malah ini mempekerjakan orang luar dari pada orang kita, lokal Balikpapan," ujarnya.

Lebih lanjut Andi Syamsir menjelaskan, selain lapangan pekerjaan perihal lainnya berkaitan dengan aksi diskriminasi pekerja orang lokal dan

orang asing yang berbeda jauh perlakuannya di dalam proyek RDMP ini.

"Juga diskriminasi terhadap orang-orang lokal. Diskriminasi itu orang-orang Korea itu. Kalau orang kita yang salah langsung diberhentikan tanpa ada SP. Tapi ketika orang Korea merokok tidak diberhentikan, malah mereka itu dilindungi juga," jelasnya.

Bahkan sejumlah temuan dari beberapa LSM menyebutkan jika para pekerja lokal yang ada tidak dilindungi dengan BPJS Kesehatan. "Banyak teman-teman itu yang dipekerjakan tidak ada BPJS dan jaminan kesehatan lainnya. Ada juga orang yang dipekerjakan tidak ada kontrak kerjanya tapi tetap disuruh bekerja. Ini kan aneh," tehas Andi Syamsir.

Masa pun menuntut untuk berdiskusi atau menyampaikan sejumlah tuntutan ini kepada pihak Manajemen RDMP.

Sekitar pukul 14.00 WITA Man-

agemen RDMP mau menerima perwakilan masa dengan jumlah 28 orang untuk berdiskusi. Namun sekitar 30 menit berlangsung masa kembali ke jalan untuk menutup jalan bundaran Karang Anyar. Hal ini lantaran pihak RDMP tidak bisa menerima seluruh tuntutan masa.

"Silahkan Bapak-bapak bicarakan apa yang mau di diskusikan. Kami akan mendengarkannya," ujar Manager Commrel PT KBP, Reno Marina Sahputri.

Kekecewaan masa pun menjadi. Dan mereka berencana akan kembali pada Jumat besok dengan membawa masa yang lebih banyak lagi serta berniat untuk mendirikan kemah di depan pintu proyek RDMP. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor:



Pupuk Kaltim Gencar Perangi Narkoba lewat Seminar 'Bontang Merdeka dari Narkoba'

BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Senin (21/8) lalu menggelar seminar bertajuk 'Bontang Merdeka dari Narkoba'.

Tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perwakilan Karang Taruna, pelajar tingkat SMA, dan anggota Persatuan Istri Karyawan Pupuk Kaltim (PIKA PKT).

Seminar mengusung tema 'Akselerasi War On Drugs Menuju Bontang Hebat Tahun 2023' dan dilaksanakan sebagai respons atas kekhawatiran Pupuk Kaltim terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kota Bontang.

VP TJSL Pupuk Kaltim, Sugeng Suedi, menyatakan bahwa penanganan masalah ini memerlukan upaya bersama dari semua pihak.

Menurut Sugeng peredaran gelap narkoba telah merambah semua lapisan masyarakat, termasuk remaja, karyawan, pegawai, dan bahkan ibu rumah tangga.

Hal ini menjadi perhatian serius

Pupuk Kaltim karena jika tidak ada langkah penanggulangan yang efektif, dampak negatifnya akan terus meluas.

"Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Bontang, Pupuk Kaltim mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang bebas dari narkoba dan memandu generasi muda menuju masa depan yang lebih baik," beber Sugeng.

Seminar ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan narkoba dan akan menggalang dukungan generasi muda dan masyarakat dalam upaya pencegahan di Kota Bontang.

Selain itu, kesadaran tentang epidemi AIDS dan hepatitis di antara pengguna narkoba juga ditekankan untuk memperkuat program dalam memerangi stigma dan diskriminasi, serta memberikan perawatan dan layanan berbasis komunitas.

Selain mendukung advokasi terkait narkoba, seminar ini juga bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang bahaya napza dan pentingnya intervensi sebagai upaya dini untuk mencegah penyalahgunaan.

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam memerangi narkoba dan dampaknya. PKT juga akan memperluas kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk memperkuat upaya pencegahan, sesuai dengan Hari Anti Narkotika Internasional 2023 yang dideklarasikan oleh PBB.

Ketua 2 PIKA PKT, Oktarina Qomazzaman, menekankan pentingnya kelanjutan kegiatan semacam ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba. Terutama mengingat penyalahgunaan narkoba di kalangan ibu rumah tangga yang semakin meresahkan.

Sementara, Iptu M Yazid, Kasat Resnarkoba Polres Bontang, juga mengapresiasi langkah Pupuk Kaltim dalam melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Dia mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang dinamis, dan upaya pencegahan dan pemberantasan harus terus berkembang melalui kolaborasi lintas sektor. (MK)

Editor: Agus Susanto

Investasi Rp 4 M untuk Perbaiki Kapal Ro-Ro di Banyuwangi, Wawali Optimistis Dongkrak PAD

BANYUWANGI - Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jaya (Perusda AUJ) Bontang telah menginvestasikan Rp 4 miliar untuk perbaikan Kapal Motor (KM) Bontang Express II jenis Ro-Ro.

Investasi ini terbukti membuahkan hasil positif dan mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Bontang, Najirah.

Najirah meninjau langsung kondisi kapal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, bersama Direktur AUJ, Rahman Ukas, dan beberapa direksi lainnya, pada Kamis (31/8) sore.

Dalam wawancara video call (video call) dengan Media Kaltim, Najirah mengungkapkan kepuasannya. "Saya awalnya mengira, kapal ini tinggal dijual kiloan saja. Namun, kondisinya sangat bagus. Ini bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujar Wawali yang mencoba perjalanan menggunakan Kapal RoRo dari Pelabuhan Gilimanuk Bali ke Pelabuhan Ketapang.

Performa Kapal Meningkatkan Drastis Setelah beroperasi selama satu bulan setengah, kapal ini menunjukkan performa yang memuaskan. "Ada sekitar 50 kendaraan kecil, truk,

dan bus yang menggunakan layanan ini," kata Najirah.

Kapal ini beroperasi 24 jam dengan 15 kali perjalanan sehari. "Tujuh kali dari Gilimanuk ke Ketapang dan delapan kali dari Ketapang ke Gilimanuk," ucapnya.

Dengan performa kapal yang membaik, Najirah optimistis kapal RoRo ini akan berkontribusi signifikan terhadap PAD. "Kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan potensi PAD yang bisa dihasilkan," tambahnya.

Sementara Rahman Ukas, Direktur Perusda AUJ, menekankan pentingnya regulasi dan manajemen yang baik dalam menjaga aset ini. "Tugas kami adalah mengamankan dan meningkatkan manajemen aset," kata Rahman.

PT Bontang Transport, sebagai anak perusahaan dari Perusda AUJ, bertanggung jawab atas operasional kapal RoRo ini. Menurut Kepala Cabang PT Bontang Transport di Banyuwangi, Dwi Harnoko, kapal ini telah mengalami beberapa audit dan perbaikan besar-besaran. Dia perkirakan perbaikannya telah me-

nelan anggaran Rp 4 miliar.

"Kami bahkan memanggil lembaga audit independen Bureau Veritas (BV) dari Perancis untuk memastikan kapal ini layak operasi," ujarnya.

Dari hasil audit oleh BV, kapal ini sebelumnya dinyatakan tidak layak operasi. Namun, setelah perbaikan, kapal ini telah memperoleh sertifikat standar minimum (SPM) dari perhubungan darat dan izin operasi selama 5 tahun. "Ada beberapa temuan minor yang sudah kami tangani. Seperti lampu di kamar mandi dan kran air yang rusak," kata Dwi Harnoko.

Untuk memastikan kondisi kapal tetap optimal, akan dilakukan perawatan setiap tiga bulan sekali. "Kami juga berencana melakukan audit internal lagi," tutup Dwi Harnoko.

Dwi juga memproyeksi bahwa jika kapal ini beroperasi dengan lancar selama 1-2 tahun dan telah berkontribusi terhadap PAD, maka ia menyarankan untuk investasi kapal baru. (MK)

Penulis/Editor: Agus Susanto





YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pekerja sedang mengerjakan proses pengerjaan TPI Tanjung Limau di Kota Bontang.

Progres Pembangunan TPI Tanjung Limau Capai 20 Persen, Konsultan Optimis Selesai sesuai Jadwal

BONTANG – Progres pengerjaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau sampai saat ini masih dikerjakan. Pengerjaan yang ditargetkan selesai pada awal November atau Desember telah mencapai 20 persen hingga saat ini.

Pelaksana lapangan kontraktor CV Abe Karya, Adit mengatakan pengerjaan saat ini telah mengerjakan tiang bangunan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek yang telah dimulai pengerjaan pada bulan Juli lalu.

“Sudah sesuai ‘schedule’. Ditargetkan Desember, progresnya sudah mencapai 20 persen,” kata Adit ditemui Mediakaltim.com, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan pengawasannya pun dilaksanakan oleh CV Citra Konstruksi. Di mana setiap bulannya memberitahukan capaian pelaksanaan proyek.

“Setiap bulan di-upgrade progresnya. Kami yakin selesai sesuai dengan target pelaksanaan,” katanya.

Sementara konsultan pengawas CV Citra Konstruksi, Doni saat dihubungi menjelaskan pengerjaan telah dikerjakan sesuai dengan jad-

wal. Hingga saat ini, ia menyebutkan pengerjaan telah mencapai 20 persen.

“Sesuai dengan kontrak sampai November, akan diselesaikan awal-awal November kami yakini selesai,” ungkap Doni.

Doni menambahkan bahwa penambahan progres bisa sampai 29-30 persen pada bulan September mendatang.

“Kan ada periodenya. Jadi betul kalau sampai saat ini 20 persen. Karena target kita pada 6 September sebesar 29 persen pengerjaan,” urainya.

Kepala UPT TPI Tanjung Limau Bontang, Muhammad Iqbal mengatakan pengerjaan memang telah dikerjakan sesuai dengan jadwal. Ia menjelaskan anggaran pengerjaan dianggarkan dari Pemerintah Provinsi Kaltim dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Pengerjaannya dari Provinsi. Dari dana DAK,” kata Muhammad Iqbal, Kamis (31/8/2023).

Iqbal menambahkan proyek pengerjaan ada dua yakni pembangunan dermaga dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di mana wewenang Kota Bontang ha-

nya mengelola TPI.

“Kewenangan dari provinsi. Kita dibangun TPI melalui DAK dari provinsi. Kota hanya mengelola ranahnya sesuai dengan regulasi,” jelas Iqbal.

Iqbal mengharapkan setelah pembangunan TPI Tanjung Limau ini selesai, TPI dapat beroperasi secara maksimal oleh masyarakat hingga dapat menarik retribusi untuk peningkatan PAD Kota Bontang.

“TPI ‘kan juga merupakan pengelolaannya masuk dalam ranah Kota Bontang,” ungkapnya.

Diinformasikan bahwa dalam papan pengumuman proyek tertera anggaran pembangunan gedung TPI di PPI Tanjung Limau dialokasikan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total nilai proyek sebesar Rp 2.280.200.000 milyar dengan kontraktor pelaksana CV. Abe Karya dan konsultan pengawas dari CV. Citra Konstruksi dengan estimasi waktu pengerjaan selama 150 hari terhitung dimulai sejak Juli 2023.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat menerima penghargaan dalam malam anugerah Merdeka Awards 2023.

Sejumlah Inovasi Antarkan Pemkab Kukar Raih Penghargaan Merdeka Awards 2023

TENGGARONG - Sejumlah inovasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), mengantarkan Kukar menerima penghargaan kategori 'Inovatif untuk Negeri'. Penghargaan langsung diterima oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dalam malam anugerah Merdeka Awards 2023. Penghargaan serupa pun didapati pula oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Menerima penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Direktur Surya Citra Media (SCM), Imam Sudjarwo. Di Senayan City Tower SCTV, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Rendi Solihin menjelaskan, penghargaan tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat, terutama seluruh jajaran yang turut serta dalam berbagai inovasi di Kukar.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya melahirkan inovasi dari tingkat RT hingga kabupaten. Ini kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Kukar," ucap Rendi Solihin.

Rendi pun mendorong agar semua jajaran tidak berpuas diri. Untuk terus dapat mengembangkan inovasi di berbagai sektor. Mengingat Kukar yang menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak selalu bisa bergantung disektor minerba untuk menopang perekonomian.

Kini disektor pertanian, Kukar menjadi lumbung pangan nomor satu di Kalimantan Timur (KalTIM). Bahkan sedang berupaya menjadi lumbung pangan untuk jadi penopang utama bagi masyarakat di IKN. "Siapa yang tidak tahu Kukar, daerah kaya sumber daya alam, terutama dari sektor minerba. Tapi, kami sadar itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan masyarakat Kukar ke depannya," tutur Rendi.

"Maka dari itu, kami mendorong semua kalangan, baik pelaku UMKM, petani, nelayan, terutama anak-anak muda untuk membuat suatu inovasi minimal satu dalam satu tahun," tutupnya.

Pewarta : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



BEBERAPA INOVASI YANG DICIPTAKAN PEMKAB KUKAR:

A. PROGRAM INOVATIF KEMANDIRIAN EKONOMI

- Kampung Raja Mapan (Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan). Program ini memberikan pelatihan peningkatan SDM dalam mendukung pertanian di Kukar.
- Sinar Purnama (Solusi Pertanian bumdes Sumber Pernama), merupakan program yang memberikan kemudahan bagi para petani untuk mendapar modal selama masa tanam.
- **Website Bisnis UMKM**
Selama ini pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha, khususnya pelaku UMKM hanya dilakukan melalui media sosial (medsos) dan e-Commerce. Dengan terobosan ini, pelaku UMKM memiliki website (bisnis) sendiri.
- Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK), memudahkan pemerintah kabupaten maupun dunia usaha dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kukar.

B. PROGRAM INOVATIF BIDANG PELAYANAN PUBLIK

- **Mabuk Kepayang**
Inovasi Mabuk Kepayang adalah pola Kemitraan BUMDes dengan Masyarakat Desa Sungai Payang. Dengan pola ini BUMDes tidak berkompetisi dengan pelaku usaha dan masyarakat, namun justru bermitra dengan pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
- **Inovasi Klik Me**
Inovasi Klik Me solusi memenuhi elektrifikasi dan kebutuhan listrik selama 24 jam dengan biaya yang terjangkau di Desa Muara Enggelam. Dengan inovasi ini, masyarakat bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam dengan biaya yang murah, yaitu sebesar Rp3.000 per hari.
- **Gemerlap (Gerakan Merdeka Lewat Air Pamsimas)**
Inovasi untuk mengatasi krisis air bersih Desa Batuah. Inovasi ini merupakan kolaborasi Pemerintah Desa Batuah, POLNES dan PT.BSSR, Tbk. Teknologi pengelolaan airnya yang berstandar PDAM, namun biayanya lebih murah. Hasilnya hampir sama. Bahkan kualitas airnya bisa lebih baik dari PDAM.
- **Aplikasi Geprek Sambar**
Inovasi Gerakan Percepatan Perekaman Data Kependudukan di Kutai Kartanegara. Perekaman jempot bola e-KTP dan Identitas Kependudukan Digital merupakan upaya pelayanan inovasi terintegrasi sadar administrasi kependudukan.
- Aplikasi Sistem Penyewaan Sarana Olahraga (Siperaga). Masyarakat bisa mengakses melalui online, bagi yang ingin menyewa fasilitas olahraga, tak perlu bersurat, namun langsung melalui aplikasi.

C. PROGRAM INOVATIF PENDUKUNG DIGITALISASI

- **Si Pajol Betijak (Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak).**
Ini adalah inovasi digitalisasi pajak daerah untuk memudahkan para Wajib Pajak (WP) membayar tagihannya

- Aplikasi QRIS Idaman

Aplikasi untuk menunjang kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya Aplikasi QRIS Idaman ini bisa memutus mata rantai data kebocoran data karena panjangnya regulasi.

- Aplikasi Sistem Informasi Jalan Lingkungan (Si Jangkung)

Aplikasi ini akan membantu dalam mengelola dan menyusun database mengenai jalan lingkungan. Masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan koreksi kondisi jalan lingkungan.

- SINTAKU (Sistem Informasi Manajemen Talenta Kutai Kartanegara)

Terobosan inovatif berbentuk aplikasi ini diciptakan sebagai wadah untuk mencari, memilih, mengembangkan, mengelola, mempertahankan dan menghargai pegawai terbaik di Pemkab Kukar. Manajemen karier PNS yang jelas dan terukur.

- Aplikasi iKukar

Inovasi Layanan Perpustakaan Digital agar minat baca masyarakat meningkat dan lebih mudah diakses. iKukar di launching pada Januari 2021, Buku digitalnya ada sekitar 1400 buku.

- Sistem Pemantauan dan Evaluasi (e-Pantau)

Inovasi untuk memaksimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kukar, sebagai alat bantu pelaksanaan program. Aplikasi ini membantu mengoptimalkan serapan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.





Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Kabupaten Paser, Achmad Hartono

Ratusan Ormas di Paser Minim Kesadaran Administrasi

PASER - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Paser mencatat, legalisasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat masih rendah.

Hingga kini, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Kabupaten Paser, Achmad Hartono menyebut, dari total 367 ormas yang ada di Kabupaten Paser, hanya 10 persen yang aktif dan memiliki Surat Keterangan Melapor (SKM) keberadaannya.

Padahal, Ormas, LSM atau Yayasan yang sudah berbadan hukum atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, dinilai penting untuk melapor agar mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kantor Kesbangpol Kabupaten Paser.

Dijelaskan Achmad Hartono, hal

itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pihaknya mengaku, kerap sosialisasi dan upaya penertiban terhadap sejumlah organisasi tersebut. Namun, belum ada perubahan signifikan.

"Kami sudah melakukan beberapa kali upaya penertiban administrasi dan sosialisasi terhadap Ormas, LSM, dan yayasan," kata Hartono.

Hartono menjelaskan, organisasi seharusnya melaporkan keberadaannya ke Kantor Bakesbangpol Kabupaten Paser, mulai dari alamat domisili, aktifitas, atribut, seperti bendera, lambang, dan atribut sebagainya.

Kemudian, jika melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerja sama ini fungsi organisa-

si menyalurkan aspirasi masyarakat dan membantu pelayanan kepada masyarakat.

"Jika organisasi bermitra dengan perangkat daerah baik tingkat desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten, harus dilengkapi dengan legalitas sebagai badan hukum," urainya.

Hal ini, lanjut Hartono, untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas organisasi, kemananan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bisa tetap terjaga dengan baik. Sehingga fungsi Kesbangpol Kabupaten Paser juga berjalan.

"Ormas atau LSM dan yayasan wajib melaporkan aktivitasnya ke Kesbangpol dan memiliki surat izin operasional dari lembaga atau instansi berwenang," kata Hartono.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Halte Sungai Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

PASER - Dua dari tiga halte sungai atau dermaga mengapung di Kabupaten Paser sampai saat ini kondisinya rusak hingga tidak bisa difungsikan.

Dua halte tersebut masing-masing terletak di desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot yang ambruk pada Juni 2023 lalu serta di desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong yang mengalami rusak pada tiang penyangganya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah menyatakan, pihaknya belum bisa melakukan perbaikan terhadap dua halte tersebut lantaran terkendala status aset.

Untuk diketahui, halte sungai di Kabupaten Paser seluruhnya dibangun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenuh) dan baru diresmikan tahun ini, atau lebih tepatnya sekitar Maret

lalu. Peresmian kala itu, Inayatullah katakan, sekaligus penyerahan aset secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Namun demikian, secara legal proses hibah ketiga aset tersebut sampai kini masih berproses. "Kita masih menunggu untuk dihibahkan ke Pemkab, agar bisa kita berikan pembiayaan untuk pemeliharaan," sambung Inayatullah.

Ia memastikan bahwa kerusakan yang terjadi tetap mendapat sentuhan penanganan darurat. Antara lain, memberi penahan pada penyangga yang rusak hingga mengangkat kembali halte sungai yang ambruk.

Meski begitu, menurut Inayatullah perbaikan secara menyeluruh tetap menjadi penting untuk dilakukan. Sebab ada beberapa aspek yang tidak cukup hanya dengan penanganan darurat, semisal kerusakan pada rel

geser halte sungai yang ambruk.

"Sekarang ini sifatnya masih melalui pembiayaan mandiri dan dibantu oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenuh," tambahnya.

Dishub Kabupaten Paser berencana menghibahkan ketiga aset kepada Pemerintah Desa (Pemdes) apabila telah mendapat hibah dari Kemenuh. Langkah ini bertujuan agar pemeliharaan bisa termonitor secara efektif oleh masing-masing desa.

"Kita sudah komunikasikan ke pihak desa bahwa halte sungai itu akan dihibahkan nantinya," pungkasnya.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



Jalankan 3 Aspek Bidang Pariwisata, Pemkab Kutim Raih Merdeka Award 2023

JAKARTA - Satu lagi bentuk pengakuan prestasi diraih Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kali ini Pemkab Kutim mendapatkan penghargaan Merdeka Award 2023 bidang Pariwisata dari media online Merdeka.com. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas terobosan Pemkab Kutim dalam mengembangkan Program Desa Wisata di Kutim.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PEK) Sandiaga Salahuddin Uno yang diwakilkan oleh Staf Kementerian PEK. Penghargaan diterima oleh Wabup Kutim Kasmidi Bulang, Rabu (30/8/2023) di Auditorium SCTV Tower, Lantai 8, Jalan Asia Afrika.

Kasmidi usai menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Merdeka.com, atas penghargaan yang diterimanya. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan ini," kata Kasmidi.

Ia pun berharap, semoga penghargaan itu, bisa memotivasi jajaran

Pembkab Kutim, untuk meningkatkan semangat dan terus menciptakan inovasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur.

"Semoga ke depannya, kami dapat terus semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi, dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kutim," kata Kasmidi.

Dalam siaran pers yang diterima media ini, dipilihnya Kutim sebagai penerima award, karena berhasil dalam Program Desa Wisata. Kriteria keberhasilan tersebut dinilai dari tiga aspek. Yakni, Program Kreatif Pendukung Desa Wisata, Program Inovasi Berbasis Digital dan Kepemilikan serta Keterlibatan Aktif Masyarakat.

Pada Program Kreatif Pendukung Desa Wisata, Kutim memiliki kegiatan Rembug Pariwisata. Rembug Pariwisata merupakan kolaborasi lintas sektor dan perangkat desa untuk peningkatan pariwisata.

Tahun ini, salah satu hasilnya adalah membentuk wadah Kepariwisataan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutim. Selain itu, dipu-

tuskan adanya surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim kepada desa dalam pengalokasian Dana Desa (DD) untuk pengembangan wisata di Kecamatan.

Untuk Program Inovatif Berbasis Digital, Kutim memiliki Program Kutim Merdeka Signal. Implementasinya berupa penyediaan jaringan internet, di 139 desa, di wilayah Kutim. Untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan fiber optic, jaringan internet disediakan melalui radio dan satellite (v-sat).

Sementara pada Program Kepemilikan dan Keterlibatan Aktif Masyarakat, Kutim meningkatkan SDM Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Objek wisata yang ada di masing-masing wilayah desa, hampir seluruhnya dikelola oleh Pokdarwis dan sebagian kecil dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sampai saat ini tercatat sebanyak 30 Pokdarwis yang mengelola potensi wisata di masing-masing desa.

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigien Kalimantan No. 116A, Sebelang Rte, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Proses Pinjam-Pakai Lahan Bendungan Lawe-Lawe Selesai, Pemkab PPU Segera Cari Dana Penyelesaian Proyek

PPU - Titik basah di tengah kekeringan yang terjadi di Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya muncul juga. Proses pinjam-pakai lahan proyek Bendungan Lawe-Lawe akhirnya resmi dilakukan.

Pemkab PPU secara resmi menandatangani serah terima dokumen pinjam pakai lahan dengan PT Pertamina (Persero). Penandatanganan digelar di Yogyakarta, tepatnya di Ballroom Hotel Tentrem, Kamis (31/8/2023), dan dilakukan langsung oleh Bupati PPU Hamdam Pongrewa dan VP Asset Optimization & Development PT. Pertamina, Noviandri. Dilanjutkan dengan serah terima dokumen antara kedua pihak.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Manager Asset Optimization Pertamina Dyah Susilowati Nuria dan jajarannya. Sementara juga ada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang dan Sekretaris Dinas PUPR PPU Ali Mustofa serta Kabag Pembangunan Daniel.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina dan seluruh jajaran, karena setelah melewati berbagai proses akhirnya dapat dilakukan serah terima kembali dalam mendukung progres pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, guna memenuhi kebutuhan baku air bersih di Kabupaten PPU," kata Hamdam usai kegiatan.

Baginya, hasil ini merupakan harapan yang telah lama tertunda. Selain keterbatasan anggaran, pembangunan bendungan di Kelurahan Lawe-lawe, Penajam yang dilaksanakan mulai 2014 ini terpaksa dihentikan pada 2017 karena persoalan masa pinjam-pakai lahan yang telah habis.

"Aset ini dalam pembangunan Bendungan Lawe-Lawe sangat penting bagi Kabupaten PPU. Karena berkaitan dengan pemenuhan air baku bersih bagi masyarakat Kabupaten PPU," imbuhnya.

Sejalan dengan pinjam pakai lahan ini, Hamdam meyakini kondisi keterbatasan air baku bagi masyarakat PPU yang memang memerlukan perhatian khusus bisa teratasi ke depannya. Karena apabila bendung ini tuntas pastinya sangat membantu suplai air baku terlebih saat masa kekeringan seperti yang saat ini terjadi.

Ia turut memastikan Pemkab PPU akan terus menjalin sinergi. Agar keberlanjutan pembangunan mega proyek ini sesuai dengan harapan. Khususnya dalam proses masa pinjam-pakai lahan yang perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

"Apalagi izin terkait pinjam pakai lahan sudah selesai dan nantinya kami akan sinergikan kembali kepada jajaran DPRD PPU, DPRD Kaltim melalui Komisi III hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan," tuturnya.

"Semoga di tahun 2024 pembangunan Bendungan Lawe-Lawe ini dapat kembali dilanjutkan sampai tuntas. Karena ke depan kebutuhan air baku pasti lebih besar seiring berbagai hal, baik jumlah penduduk, pembangunan dan hal-hal lainnya," beber Hamdam.

Untuk diketahui, Bendungan Lawe-Lawe, itu berdiri

di atas lahan 220 hektare dengan status lahan pinjam pakai dari PT Pertamina. Dalam prosesnya, Pemkab PPU tercatat telah mengalokasikan anggaran Rp 179 miliar untuk pembangunannya dengan skema anggaran tahun jamak (multiyears).

"Terkait pinjam pakai ini, kami akan melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terkait PBB dan beberapa hal lainnya kepada PT Pertamina. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam pinjam pakai lahan," ujar Hamdam.

Lebih lanjut, walau perjanjian penggunaan lahan telah didapatkan, Pemkab PPU masih memiliki pekerjaan rumah lain dalam menuntaskan proyek ini. Yakni kebutuhan dana untuk melanjutkan pembangunannya.

Asisten II Setkab PPU, Nicko Herlambang mengungkapkan hasil serah terima pinjam-pakai lahan ini menjadi bagian penting. Menjadi dasar dari proses kelanjutan proyek yang akan mulai lagi dilakukan di 2024 mendatang.

"Serah terima pinjam-pakai ini menjadi landasan melanjutkan progres pembangunan," ucapnya.

Sekadar informasi, perhitungan sementara ini untuk merampungkan proyek itu membutuhkan dana sekira Rp 150 miliar. Untuk memenuhi itu, Pemkab PPU masih melobi Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan untuk pemenuhannya.

"Kemudian progres lanjutannya yaitu menghitung ulang kembali dasar alokasi anggaran yang dibutuhkan, baik dari Pemkab PPU, alokasi anggaran Pemprov Kaltim dan BWS Kalimantan maupun sumber lainnya dalam mendukung pembangunan ini hingga tuntas," tutup Nicko.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Prosesi penandatanganan kesepakatan pinjam-pakai lahan seluas 220 hektare untuk kelanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Yogyakarta, Kamis, (31/8/2023).



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Proses pemadaman oleh personel gabungan PPU saat terjadi karhutla baru-baru ini.

Sumber Air Terus Menipis, Warga PPU Diminta Tak Bakar Lahan

PPU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih terus menghantui. Seluruh masyarakat di PPU diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Pemkab PPU di banyak kesempatan selalu mengingatkan akan musim kemarau yang saat ini terjadi. Satu dampak yang paling terasa ialah berkurangnya cadangan air bersih.

Selain menjadi masalah tersendiri untuk kebutuhan dasar masyarakat, hal ini juga memengaruhi upaya penanganan saat terjadi karhutla. Sebab, saat ini kebutuhan akan air bersih semakin meningkat, namun ketersediaan yang semakin sedikit bahkan kurang.

"Saya mengingatkan agar kita bisa melakukan penghematan dalam penggunaan air. Kami sangat bermohon kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terutama ketika menghimpun sampah yang berada di kiri kanan rumah dan terus membakarnya ini bisa berpotensi menjadi kebakaran," ujar Sekkab PPU, Tohar, Kamis (31/8/2023).

Terbukti dengan beberapa embung yang mulai kering. Maka dari itu, pencegahan terjadinya Karhutla menjadi pokok pekerjaan yang

dilakukan.

"Dan pada para pemilik lahan, kami mohon untuk tidak membuka dengan membakar. Karena ini bisa berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau ini tidak bisa terkontrol sedangkan sumber daya dan peralatan kita terbatas ini bisa menjadi potensi yang membahayakan bagi kita semua," jelas Tohar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Budi Santoso mengungkapkan selama musim kemarau dan El-Nino kali ini setidaknya membuat sekira 28 hektare lahan terbakar. Itu dari 18 kejadian yang ada.

Kasus karhutla tersebut terbanjak terjadi di wilayah Kecamatan Penajam. Karena mayoritas lahan di wilayah itu merupakan lahan gambut yang mudah terbakar.

"Kebakaran hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan, terbesar dengan luas 12 hektare terjadi di Kelurahan Petung," sebutnya.

Ia meyakinkan peralatan yang dimiliki BPBD PPU saat ini masih aman dan mencukupi. Serta kesiapan dan jumlah personel juga memadai untuk melakukan pemadaman karhutla.

"Kami dan instansi terkait juga terus melakukan sosialisasi kepada

masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat," katanya.

Namun, Budi mengakui kendala saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah akses menuju lokasi kebakaran. Yang tak jarang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor sehingga harus ditempuh berjalan kaki dengan membawa peralatan.

Lalu ada kendala yang lebih besar, di lokasi kebakaran hutan dan lahan sumber air menipis atau tidak ada sumber air yang dibutuhkan untuk pemadaman. Sehingga pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat mengelilingi api, namun membutuhkan waktu yang lama dan potensi meluas cukup besar.

"Masyarakat dan perusahaan terus diingatkan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Serta meminta warga agar tidak membuang puntung rokok di lahan yang mudah terbakar, karena pada saat musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran," demikian Budi.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



BPBD PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran dan minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam pemadaman api.

Karhutla Terjadi Lagi di RT 16 Petung, Butuh 7,5 Jam Memadamkan

PPU - Lagi-lagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di RT 16 Kelurahan Petung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Akses yang sempit serta sumber air yang mengering menjadikan kendala petugas memadamkan kebakaran.

Sedikitnya, pada musim kemarau kali ini sudah keempat kalinya wilayah itu terbakar. Menyebabkan sudah sekira 20 hektare lahan di sana hangus terbakar.

Terbaru, Kamis (31/8/2023), peristiwa karhutla terjadi sekira pukul 14.00 Wita. Tim gabungan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU berjibaku sekurang-kurangnya selama 7 jam 30 menit karhutla sepenuhnya terkendali.

Berbagai kendala dihadapi tim yang terdiri dari BPBD PPU, Distan PPU, Satpol-PP PPU, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kodim 0913/PPU, Polres PPU, Pospol Damkar Petung, DPKP PPU dan Aparat Kelurahan Petung. Yaitu lokasi kejadian yang tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda empat.

Aksesnya terbatas. Hanya membuat petugas hanya dapat mobilisasi dan demobilisasi peralatan dengan menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki. Makanya proses pemadaman berlangsung hingga malam tiba.

Jadi, hanya dapat memaksimalkan kerja 3 unit mesin air portable milik BPBD dan Distan PPU saja. Serta ada 1 unit mobil tangki Distan PPU yang mendistribusikan air dari luar jangkauan.

"Pemadaman dilakukan dengan cara manual dan menggunakan mesin portable," kata Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU, Nurlaila melalui keterangan resminya.

Itu juga dengan menggunakan sekira 75 set selang dengan masing-masingnya sepanjang 30 meter. Masalah ini disebabkan lokasi karhutla yang cukup jauh dengan sumber air. Ditambah, sumber air di dekat lokasi juga sudah mengering dalam cuaca kemarau ini.

Meski situasi sudah sepenuhnya terkendali, BPBD PPU tetap akan melakukan monitoring di lokasi pasca kejadian. Untuk memastikan kejadian ini tidak terus terulang, pun memastikan lagi penyelidikan penyebab kejadian.

Terpisah, Lurah Petung Achmac Fitriady menjelaskan di beberapa titik di RT 16 yang terbakar beberapa kali ini memang merupakan area lahan gambut. Yang kondisinya saat ini, dalam musim kemarau ini, sangat kering.

Maka tidak mengherankan pada lokasi tersebut sangat mudah terba-

kar. "Lahan di wilayah tersebut memang ketika musim kemarau sangat kering. Yang mengakibatkan, seperti ada yang membuang puntung rokok saja, memungkinkan untuk terjadinya kebakaran," ungkapnya.

Meski begitu, Ady, sapaannya, tidak dapat memastikan penyebab sebenarnya kejadian ini terus terjadi di wilayah yang ia pimpin secara administratif itu. Sebab masih memerlukan kajian dan identifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang.

Namun. "Mohon maaf, saya juga tidak bisa memastikan kalau ini sengaja dibakar (untuk kepentingan pembukaan lahan), tapi kemungkinan cuaca panas ekstrem bisa saja dianggap menjadi penyebabnya. Walau sulit juga dipredikisi lahan itu bisa terbakar sendiri," terangnya.

Adapun begitu, sepanjang memasuki bulan kemarau ini, Kelurahan Petung terus mengoptimalkan sosialisasi untuk mewaspadaai potensi karhutla pada seluruh warganya. Pada setiap kesempatan, formil ataupun tidak, pemahaman untuk mencegah terjadinya kebakaran ini terus dilakukan.

"Kelurahan selalu menginformasikan dan menyosialisasikan kewaspadaan terhadap potensi karhutla terjadi, karena kerawanan sangat mungkin terjadi dalam kondisi cuaca akhir-akhir ini," pungkas Ady. (SBK)



Paket MAKSIMAL Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp 90rb nett /pax

Paket Ber3

Rp 130rb nett /pax



Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE 1 pax comp. Light Meal



www.hotelgrandkartika.com

Koran DIGITAL

MEDIA

KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim